

## Edukasi BPJS Kesehatan dalam Meningkatkan Pengetahuan dan Partisipasi Masyarakat terhadap Jaminan Kesehatan Nasional di Desa Pinagar Kecamatan Arse Tahun 2025

Usrawati Pasaribu<sup>1</sup>, Septriana Sari<sup>2</sup>, Khoirunnisa Nasution<sup>3</sup>, Julida Rahmasari<sup>4</sup>, Anwar Harahap<sup>5</sup>

<sup>1-5</sup> Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Sentral

\*e-mail: usrapasaribu94@gmail.com<sup>1</sup>, septriana161@gmail.com<sup>2</sup>, nisa.nst88@gmail.com<sup>3</sup>

Nomor Handphone : 0852-7554-5027

### Abstrak

Pelayanan kesehatan yang baik merupakan suatu kebutuhan masyarakat dan sering kali menjadi ukuran dalam keberhasilan pembangunan. Menyadari bahwa pelayanan kesehatan menjadi kebutuhan setiap warga negara maka pemerintah berupaya dari waktu ke waktu untuk menghasilkan program-program yang dapat meningkatkan pelayanan kesehatan secara menyeluruh. Salah satu program yang diselenggarakan oleh Pemerintah Indonesia adalah penyelenggaraan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) menurut Undang-Undang yakni UU Nomor 40 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Pada Maret 2024, rata-rata rumah tangga miskin di Indonesia memiliki 4,78 orang anggota rumah tangga. Kemiskinan sangat erat kaitannya dengan kesehatan, sebab masyarakat miskin akan susah mengakses pengobatan ketika sakit, masyarakat miskin susah membeli obat dan tidak mampu melanjutkan pengobatan di tingkat lanjut apabila memiliki penyakit berat. BPJS Kesehatan (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) adalah organisasi yang dibiayai oleh pemerintah yang dibentuk oleh pemerintah untuk menyelenggarakan jaminan kesehatan kepada seluruh rakyat Indonesia. Jumlah peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (PBJS) di Tapanuli Selatan Tahun Desember tahun 2024 yaitu Penerima Bantuan Iuran (PBI) sebanyak 211.135 jiwa, Non PBI sebanyak 98.899 jiwa, jumlah keseluruhan yaitu 310.034 jiwa. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan beberapa penduduk Desa Pinagar Kecamatan Arse bahwa dari 20 masyarakat terdapat 15 orang yang belum menjadi peserta JKN dengan alasan besarnya iuran yang harus mereka bayar tiap bulannya, pendapatan dari pekerjaan mereka yang kurang mencukupi untuk memenuhi kebutuhan selain kebutuhan pokok, dan juga mereka menilai bahwa dengan menjadi peserta JKN dapat merugikan mereka karena dalam kondisi kesehatan yang baik mereka tetap membayar iuran tiap bulannya.

**Kata kunci:** Edukasi, BPJS, Pengetahuan

### Abstract

*Good healthcare services are a basic need of society and are often used as a measure of success in development. Realizing that healthcare services are essential for every citizen, the government continuously strives to implement programs that can improve healthcare services comprehensively. One such program implemented by the Indonesian government is the Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) program, which is administered by the Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) in accordance with the law, UU Number 40 on the Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). As of March 2024, the average poor household in Indonesia consisted of 4.78 members. Poverty is closely related to health, as poor communities struggle to access medical treatment when sick, cannot afford to buy medicine, and are unable to continue advanced*

*treatment for serious illnesses. BPJS Kesehatan (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) is a government-funded organization established to provide health insurance for all Indonesian citizens. In South Tapanuli, as of December 2024, the number of BPJS participants consisted of 211,135 individuals in the Penerima Bantuan Iuran (PBI) category and 98,899 individuals in the non-PBI category, making a total of 310,034 participants. Based on interviews conducted with several residents of Pinagar Village, Arse Sub-district, it was found that out of 20 people, 15 had not enrolled in the JKN program. Their reasons included the high monthly premiums, low income that is only sufficient to meet basic needs, and the perception that enrolling in the JKN program could be disadvantageous, as they are required to pay monthly premiums even when they are in good health.*

**Keywords:** Education, BPJS, Knowledge

## 1. PENDAHULUAN

Kesehatan merupakan Hak Asasi Manusia atau hak bagi setiap individu (the right of self determination) yang harus diwujudkan melalui jaminan pemberian kesehatan yang aman dan berkualitas oleh pemerintah dan jasa pelayanan Kesehatan.<sup>1</sup> Pelayanan kesehatan yang baik merupakan suatu kebutuhan masyarakat dan sering kali menjadi ukuran dalam keberhasilan pembangunan. Menyadari bahwa pelayanan kesehatan menjadi kebutuhan setiap warga negara maka pemerintah berupaya dari waktu ke waktu untuk menghasilkan program-program yang dapat meningkatkan pelayanan kesehatan secara menyeluruh. Salah satu program yang diselenggarakan oleh Pemerintah Indonesia adalah penyelenggaraan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) menurut Undang-Undang yakni UU Nomor 40 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN).<sup>2</sup>

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menegaskan bahwa setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh akses atas sumber daya di bidang kesehatan dan memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau. Sebaliknya, setiap orang juga mempunyai kewajiban turut serta dalam program jaminan kesehatan sosial.<sup>3</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) memiliki beberapa pasal yang berkaitan dengan kesehatan. Pasal 28H ayat (1) menjamin hak setiap orang untuk hidup sejahtera lahir dan batin, termasuk berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan negara wajib menyediakannya. Pasal 34 ayat (3) juga menegaskan bahwa negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.<sup>4</sup>

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik persentase penduduk miskin Maret Tahun 2024 sebesar 25,22 juta orang. Persentase penduduk miskin perkotaan pada Maret 2024 sebesar 7,09 persen, sedangkan persentase penduduk miskin pedesaan pada Maret 2024 sebesar 11,79 persen. Pada Maret 2024, rata-rata rumah tangga miskin di Indonesia memiliki 4,78 orang anggota rumah tangga.<sup>5</sup> Kemiskinan sangat erat kaitannya dengan Kesehatan, sebab masyarakat miskin akan susah mengakses pengobatan ketika sakit, masyarakat miskin susah membeli obat dan tidak mampu melanjutkan pengobatan di tingkat lanjut apabila memiliki penyakit berat.<sup>5</sup>

BPJS Kesehatan (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) adalah organisasi yang dibiayai oleh pemerintah yang dibentuk oleh pemerintah untuk menyelenggarakan jaminan kesehatan kepada seluruh rakyat Indonesia, terutama pegawai negeri sipil, pensiunan pegawai negeri sipil, militer/politisi, veteran, penggerak diri sendiri dan keluarganya. lembaga pemerintah yang ditunjuk. dan entitas lain atau anggota masyarakat.<sup>6</sup>

Jumlah peserta JKN di Indonesia hingga 30 April 2025 adalah 279.981.920 jiwa, dimana jumlah peserta Penerimaan Bantuan Iuran (PBI) sebanyak 41,1 % (115.078.446), Pekerja Penerima Upah (PPU) Penyelenggara Negara sebanyak 7,1% (19.820.372), Pekerja Penerima Upah (PPU) Non Penyelenggara Negara - BUMN sebanyak 1.522.020 jiwa, Pekerja Penerima Upah (PPU) Non Penyelenggara Negara - Swasta sebanyak 16,2% (45.391.533), Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) sebanyak 12,1% (33.802.830), Bukan Pekerja (BP) Penyelenggara

Negara sebanyak 4.896.861 jiwa, Penduduk yang didaftarkan Pemerintah Daerah sebanyak 21,1% (58.945.949).<sup>7</sup>

Jumlah peserta JKN di Sumatera Utara pada tahun 2023 yaitu BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran sebanyak 35,00%, BPJS Kesehatan Non-Penerima Bantuan Iuran sebanyak 25,62%, Jamkesda sebanyak 2,96%, Asuransi Swasta sebanyak 0,52% dan Perusahaan atau Kantor sebanyak 3,73%. Sedangkan di Kabupaten Tapanuli Selatan BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran sebanyak 41,85%, BPJS Kesehatan Non-Penerima Bantuan Iuran sebanyak 15,96%, Jamkesda sebanyak 0,00 %, Asuransi Swasta sebanyak 0,00%, dan Perusahaan atau Kantor sebanyak 0,43%.<sup>8</sup>

Jumlah peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (PBJS) di Tapanuli Selatan Tahun Desember tahun 2024 yaitu Penerima Bantuan Iuran (PBI) sebanyak 211.135 jiwa, Non PBI sebanyak 98.899 jiwa, jumlah keseluruhan yaitu 310. 034 jiwa.<sup>9</sup>

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan beberapa penduduk Desa Pinagar Kecamatan Arse bahwa dari 20 masyarakat terdapat 15 orang yang belum menjadi peserta JKN dengan alasan besarnya iuran yang harus mereka bayar tiap bulannya, pendapatan dari pekerjaan mereka yang kurang mencukupi untuk memenuhi kebutuhan selain kebutuhan pokok, dan juga mereka menilai bahwa dengan menjadi peserta JKN dapat merugikan mereka karena dalam kondisi kesehatan yang baik mereka tetap membayar iuran tiap bulannya. Maka perlu dilakukan edukasi BPJS Kesehatan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang jaminan Kesehatan.

**2. METODE**

Kegiatan pengabdian masyarakat ini berupa pemberian penyuluhan atau pemberian informasi kepada masyarakat tentang penggunaan BPJS Kesehatan untuk mencapai kesehatan masyarakat. Kegiatan penyuluhan melalui metode ceramah dan pemberian leaflet. Peralatan yang digunakan adalah audio system, spot projector dan leaflet untuk dibagikan kepada peserta. Pengabdian masyarakat ini diadakan di Desa Pinagar Kecamatan Arse. Masyarakat yang mengikuti kegiatan pengabdian masyarakat ini terdiri dari 15 orang.

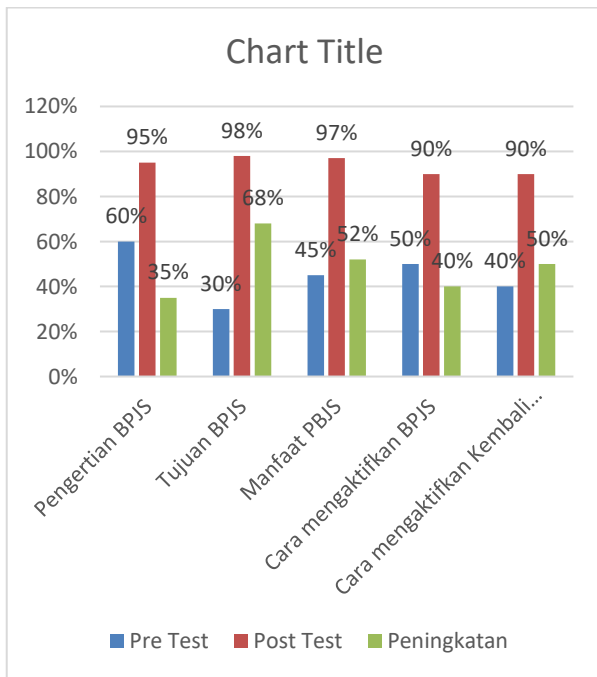
**3. HASIL**

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan Sabtu tanggal 01 Februari 2025 di Desa Pinagar Kecamatan Arse Kabupaten Tapanuli Selatan dengan kegiatan penyuluhan tentang Edukasi BPJS Kesehatan dalam Meningkatkan Kesadaran dan Partisipasi Masyarakat terhadap Jaminan Kesehatan Nasional. Kegiatan ini dilakukan dengan menggunakan metode ceramah dan diskusi. Peserta kegiatan penyuluhan Kesehatan sangat antusias dengan kegiatan ini. Para peserta aktif bertanya seputar BPJS dan masalah yang berhubungan dengan pelayanan Kesehatan dan jaminan Kesehatan.

Tabel. 1 Pengukuran Pre Test dan Post Test tentang Pengetahuan Masyarakat tentang BPJS dalam Meningkatkan Kesadaran dan Partisipasi Masyarakat terhadap Jaminan Kesehatan Nasional

N o	Materi	Pre Test	Pos t Test	Peningkata n
1.	Pengertian BPJS	60 %	95 %	35%
2.	Tujuan BPJS	30 %	98 %	68%
3.	Manfaat PBJS	45 %	97 %	52%
4.	Cara mengaktifk an BPJS	50 %	90 %	40%
5.	Cara mengaktifk an Kembali kepesertaan BPJS yang sudah nonaktif	40 %	90 %	50%

Untuk penjelasan peningkatan persentase pengetahuan masyarakat tentang BPJS dalam Meningkatkan Kesadaran dan Partisipasi Masyarakat terhadap Jaminan Kesehatan Nasional



#### 4. PEMBAHASAN

Setelah dilakukan sosialisasi melalui ceramah dan diskusi kepada 15 responden yang dilakukan melalui pre test dan post test di dapatkan hasil

##### 1. Pretest

Evaluasi awal yang dilakukan kepada 15 responden untuk mengetahui tingkat pemahaman terhadap BPJS yang diberikan dengan beberapa pertanyaan mengenai BPJS, yang terdiri dari (1) Pengertian BPJS, (2) Tujuan BPJS, (3) Manfaat BPJS, (4) Cara mengaktifkan BPJS, dan (5) Cara mengaktifkan Kembali kepesertaan BPJS yang sudah nonaktif. Dari hasil evaluasi diperoleh hasil bahwa peserta belum memahami tentang BPJS.

##### 2. Post Test

Evaluasi post test dilakukan setelah kegiatan penyuluhan tentang Edukasi BPJS Kesehatan dalam Meningkatkan Kesadaran dan Partisipasi Masyarakat terhadap Jaminan Kesehatan Nasional dilakukan. Kemudian menilai sejauh mana pemahaman peserta, apakah meningkat setelah dilakukan edukasi mengenai BPJS. Tingkat pengetahuan masyarakat terkait pengertian BPJS secara umum masih kurang. Hal ini terlihat dari hasil pretest, di mana 60% responden memberikan jawaban benar. Setelah diberikan penyuluhan tentang BPJS dalam kegiatan pengabdian masyarakat, terjadi peningkatan signifikan pada hasil post-test, dengan 95% responden

menjawab benar. Evaluasi pretest dan post-test ini menunjukkan adanya peningkatan pemahaman masyarakat tentang BPJS dalam meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat terhadap jaminan kesehatan nasional yang meningkat sebesar 35%. Hasil temuan diatas menunjukkan bahwa kegiatan penyuluhan mampu meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang BPJS dan peran mereka dalam mendukung kesehatan, dengan peningkatan sebesar 65%. Hal ini menegaskan pentingnya sosialisasi yang efektif untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap BPJS. Temuan ini sejalan dengan hasil pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh zein, 2023 bahwa terdapat peningkatan pengetahuan pada post test 100%.<sup>10</sup>

Penyuluhan kesehatan merupakan kegiatan pendidikan kesehatan yang dilakukan dengan menyebarkan pesan dan menanamkan rasa percaya diri. Hal ini tidak hanya meningkatkan kesadaran, pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang kesehatan, tetapi juga meningkatkan kemauan mereka untuk melaksanakan anjuran Kesehatan.<sup>11</sup> Konsultasi pemanfaatan pelayanan kesehatan BPJS untuk mencapai kesehatan masyarakat melalui metode ceramah dan Focus Group Discussion (FGD) dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat Lakala Palanga Selatan. Desa, Provinsi Konao Selatan. Diharapkan Pemerintah daerah dan Puskesmas Kabupaten Palanga Selatan dapat melakukan tes kepada seluruh masyarakat untuk mengcover kepesertaan BPJS.<sup>12</sup>

Hasil pengabdian kepada masyarakat tentang edukasi bpjs kesehatan dalam meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat terhadap jaminan kesehatan nasional kepada masyarakat dengan memberikan metode ceramah dan pemberian leaflet didapatkan hasil peningkatan pemahaman tentang BPJS setelah dilakukan edukasi. Hal ini sejalan dengan pengabdian masyarakat yang menyatakan bahwa metode ceramah dengan media slide dapat menarik mata dan telinga siswi, penggunaan indera sepenuhnya dapat menghasilkan hal yang baik. Hal ini dapat dilihat dari meningkatnya persentase pengetahuan setelah diberikannya penyuluhan menggunakan metode ceramah dengan media slide.<sup>13</sup>

## 5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan di Desa Desa Pinagar Kecamatan Arse yang terdiri dari 15 orang didapatkan hasil peningkatan pengetahuan setelah dilakukan edukasi dengan metode ceramah dan pembagian leaflet. Hal ini dapat dilihat dari hasil pretes dan post test, dan peningkatan pengetahuan dan pemahaman disetiap pertanyaan yang diberikan.

## 6. Referensi

- Jurnal unsrat Dinda Nur Riyanti, Theodorus H.W. Lumunon, Vecky Yanni Gosal. (2021). Perlindungan Hukum Bagi Pasien Covid-19 Menurut Hukum Positif Di Indonesia, *Lex Administratum*, Vol. IX/No. 2/Mar/EK/2021, Fakultas hukum Universitas Samratulangi Manado
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional,” 1369.
- Undang-Undang terbaru, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)
- Badan Pusat Statistik Maret Tahun 2024.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia, 2020 BPJS Kesehatan, 2025
- Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara, 2023
- Kabupaten Tapanuli Selatan Dalam Angka, 2025
- E. R. Zein and A. P. Marisa. (2023) “Sosialisasi Kepesertaan BPJS dalam Program JKN sebagai Upaya Universal Health Coverage di Desa Baron Kabupaten Nganjuk,” *J. Inov. Pengabd. dan Pemberdaya. Masy.*, vol. 3, no. 1, pp. 339–346, 2023.
- Basuki, N., Sidayat, M., Nurdiyanawati, D., Karmila, I., Kaddas, F., Dewi, F. K., Kusuma, E., & Suhardi. (2022). BARAKATI : Journal of Community Service Penyuluhan Pengasapan Ikan Cakalang Menggunakan Asap Cair BARAKATI : Journal of Community Service. BARAKATI: Journal of Community Service, 01(1), 26–30.
- Wardiah, R., Izhar, M. D., Butar, M. B., & Minarni, M. (2023). Edukasi Penggunaan Aplikasi Mobile JKN Dalam Upaya

Memudahkan Akses Pelayanan Kesehatan (BPJS KESEHATAN) Di SMA N 11 KOTA JAMBI. *Darmabakti: Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat*, 4(1), 25-31.

Wulan, S, D, Eky, L, N., Duana, M., Nabela, D., (2024). Penyuluhan Menggunakan Metode Ceramah Dengan Media Slide Terhadap Pengetahuan Remaja Putri Tentang Premenstrual Syndrome (PMS). *Jurnal Meternitas Kebidanan*, Vol 9, No. 1, April2024.

## 5. DOKUMENTASI



